

Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman	
Indikator	Indeks Rasa Aman Rasa aman merupakan kebutuhan dan hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 aspek yang dinilai meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari.
Fenomena / Penyebab	Masih tingginya ancaman yang menyebabkan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya

Hal 15 Metadata Indikator; Pilar Pembangunan dan Tata Kelola (Kementerian PPN/Bappenas, Edisi II, Tahun 2020 : menyebutkan bahwa perhitungan Indeks Rasa Aman adalah Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 100%.

Hal 15 Metadata Indikator; Pilar Pembangunan dan Tata Kelola (Kementerian PPN/Bappenas, Edisi II, Tahun 2020 : Perhitungan Indeks Rasa Aman merupakan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kondusifitas wilayah	
Indikator	Prosentase Penurunan Masalah terkait Ipoleksosbud
Fenomena / Penyebab	Kondisi keamanan suatu bangsa tidak terlepas dari korelasi Antara geografis, demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, Ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan yang saling berinteraksi, saling mempengaruhi dan diperhitungkan dalam pencapaian tujuan nasional (Mewujudkan Stabilitas Keamanan mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional - Laksamana Pertama TNI Heru Kusnanto; Jurnal Lemhanas RI; MAret 2016

Penjelasan bahwa dengan Meningkatnya Kondusifitas wilayah terkait ipoleksosbud maka Akan menciptakan rasa aman :

Terciptanya Stabilitas politik dapat membuka ruang terwujudnya keamanan yang stabil. Kondisi keamanan yang stabil membuat Pemerintah selaku pengelola Negara dapat fokus pada cita-cita dan tujuan nasional dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan rakyat
Mewujudkan Stabilitas Keamanan mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional : Laksamana Pertama TNI Heru Kusnanto; Jurnal Lemhanas RI; MAret 2016

Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi (huruf B angka 4 lampiran Permenpan RB No. 26 tahun 2020 menyebutkan bahwa nilai hasil akhir (indeks reformasi birokrasi) dari penjumlahan komponen komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi
Fenomena / Penyebab	Indeks Reformasi Birokrasi Pemkab Lumajang masih terkategori CC dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2020 - 2021) 2020 : 56,66 2021 : 58,94 sumber : Surat Menpan atas LHE RB Kab. Lumajang tahun 2020 s.d 2021

Hal 34 lampiran Permenpan RB No. 26 tahun 2020 disebutkan bahwa penilaian kepuasan terhadap pelayanan merupakan salah satu indikator dalam lembar kerja evaluasi Reformasi Birokrasi, dimana yang diukur adalah :

1. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
2. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat dilasas secara terbuka
3. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat

Sebagaimana tertuang dalam hal 39 lampiran Permenpan RB No. 25 tahun 2020, disebutkan bahwa salah satu sasaran reformasi birokrasi adalah pelayanan publik yang prima.
Selanjutnya sebagaimana Surat Gubernur Jatim nomor : 065/16122/031.3/2017 tgl 14 September 2017 disebutkan bahwa salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan IKM kepada pengguna layanan.

Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang keamanan	
Indikator	Indeks kepuasan masyarakat di bidang keamanan referensi : Bab I huruf H angka 2 Lampiran Permenpan RB No. 14 tahun 2017 yang menyebutkan tentang definisi Indeks Kepuasan Masyarakat
Fenomena / Penyebab	Adaptasi Dituding Abadi dalam Konflik Tambak Lumajang "Kontes untuk Orang Hilang dan Korban Lindak Kekerasan (Kontra) mendinwacarat pemantik heku dan pemerintah abadi dalam menangan konflik keamanan tambak di Pantai Watu Perak, Selak Awar-Awar, Kabupaten Lumajang" (Sumber: https://www.bharnews.com/indonesia/berita/pepambaran-watir-09282015144905.html)

Penjelasan bahwa fenomena masalah yg terjadi di Lumajang terkait persentase penanganan masalah strategis menyebabkan Fenomena/masalah kepuasan masyarakat terkait pelayanan bidang keamanan berdasarkan hasil survey IKM th 2019-2021 (Sumber : ARTIKEL "MIBUDSMAN" • Rabu, 22/01/2020 • Darius Bada Daton, H. tentang layanan publik dan kepuasan masyarakat "KEBERFUNGSIAN SOSIAL MASYARAKAT DI DAERAH AWAN KONFLIK DI KABUPATEN LUMAJANG, Rathinobosowi, SOSIO KONSEPSIA Vol. 8, No. 01, September - Desember, Tahun 2018 , hal. 14 "Konflik yang terjadi berpengaruh pada pelaksanaan kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama dalam pemenuhan, fungsi sosialnya"

Penjelasan bahwa dengan Meningkatnya Kondusifitas wilayah maka akan Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang keamanan (berita " Survei Kompas Januari 2022 menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan di bidang politik dan keamanan naik signifikan. Tingkat kepuasan ini meningkat hampir 7 persen dibandingkan survei sebelumnya") Oleh EREH MARSUQRILLA 21 Februari 2022 04:46 WIB "Yberadaan SKD saat ini sangat dirasakan oleh masyarakat Tukum. Jangankan kriminalitas, anak-anak-anak yang suka nongkrong sambil minum-minuman keras pun kami tindak. Sehingga, masyarakat merasakan wilayah Tukum benar-benar aman dengan keberadaan SKD" (beritasatu.com) Rabu, 17 Juli 2019 | 14:04 WIB "Neh : Gardi Gazarin " tentang Satgas Keamanan Desa di Lumajang Bisa Jadi Contoh untuk Nasional

Meningkatnya Kondusifita wilayah	
Indikator	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas) (Sumber : permendagri no 86/2017)
Fenomena / Penyebab	Fenomena masalah yg terjadi di Lumajang terkait penanganan masalah strategis, berdasarkan laporan Ipoleksosbud dan Tibmas tahun 2019, jumlah Ipoleksosbud dan tibmas 132, tahun 2020 jumlah Ipoleksosbud dan tibmas 192, tahun 2021 jumlah Ipoleksosbud dan tibmas 1.107